

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Merujuk pada penjabaran latar belakang yang telah disajikan diatas maka diperoleh kumpulan teori atau konsep yang dipilah sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan peran bumdes dalam pengelolaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan mengulas terlebih dahulu tentang penelitian yang bersumber dari jurnal maupun buku yang dinilai dapat mempermudah dan menjelaskan penelitian ini.

2.1 Literatur Review

Literatur review adalah sekumpulan konsep maupun hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, yang biasanya dipergunakan sebagai acuan maupun landasan dalam riset yang akan dipergunakan untuk dapat menunjang pembahasan dari penelitian ini. Manfaat dari literatur review ini dapat menambahkan wawasan tentang konsep maupun hasil dari penelitian yang dapat digunakan untuk menambah sudut pandang dalam menjawab permasalahan yang akan di jabarkan didalam pembahasan, serta literatur review juga dapat memberikan gambaran atau jawaban dari penelitian sebelumnya. Berikut literatur review yang terkait pada masalah diatas.

Penelitian Pertama oleh Muthia Andriani dan Muhammad Yusuf dengan judul partisipasi masyarakat desa saliki : program water suplly dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Menjelaskan tentang konsep pemberdayaan yang dapat dilaksanakan secara mandiri, melakukan kerjasama dengan pemerinah maupun berkolaborasi dengan perusahaan yang ada disekiar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES MEKARSARI tersebut dalam menjalankan Program Water Suplly mendapatkan bantuan dari PT pertamina hulu sanga sanga yang menyediakan pipa, panel control, pompa vertical dan beberapa aksesoris yang lainnya sebagai hubungan mitra, serta pada kegiatan sosial didanai oleh masyarakat secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut telah

berhasil menyalurkan kepada 354 Rumah Tangga, dengan penerima manfaat kurang lebih 2.059 jiwa. Yang ditemukan bahwa masyarakat Desa Saliki mendapatkan air yang layak pakai untuk dapat menugrangi penyakit kulit yang berada di masyarakat dan juga dapat membuka lapangan kerja baru kepada UMKM, serta program water suplay sistem yang di jalankan BUMDES ini sudah memberikan pendapat kepada Pemerintahan Desa sebesar 30%, sebagai bentuk BUMDES ikut serta dalam mengembangkan desa. Serta dalam program ini juga mampu memberikan kontribusi berupa bantuan saosial dan pendidikan 5% dari hasil usaha. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDES MEKARSARI sudah dapat memberikan kontribusi kepada mayaraka maupun desa.

Penelitian kedua oleh afien junior ismani, ertien rining nawangsari dengan judul peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) usaha mandiri sejahtera dalam pengelolaan Hhimpunan penduduk pemakai air minum (HIPAM) di Desa Kesamben wetan Kecamatan Driyarejo Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian yang di temukan bahwa Bumdes desa kesamben wetan telah berhasil melayani 54% dari total masyarakat desa, serta debit yang dihasilkan mencapai 6 Liter per Detik dan selalu bertambah disetiap Tahunnya. Hal ini dibuktikan pada jumlah debit yang dihasilkan pada awal hanya 11.660 m³ dan pada Tahun 2018 sudah mencapai 13.000 m³ setiap bulanya.

Penelitian ketiga oleh hanny, litya Agustina, ita salsalina lingga, yenni Carolina, elyzabeth I marpaung, erna, herman kambono, lauw tjun tjun, oktavianti, eniro goiyardi dengan judul analisis pemetaan profil badab usaha milik desa serta potensi dan permasalahanya dibidang pengeloan air. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil yang ditemukan dalam penelitian tersebut bahwa Pengelolaan Air Bersih yang dijalankan o leh BUMDES Kertajaya sudah memiliki konsumen sebesar 387 keluarga yang berkisaran 1.000 orang. Dalam pengelolaan Bumdes kertjaya sudah dinilai baik dibidang sosial dan ekonomi, walaupun di dalam kobndisi desa dinilai oleh peneliti belum memadai dalam menunjang keberadaan BUMDES akan tetapi Bumdes sudah mulai berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat desa dalam mendapatkan air

bersih, dengan kata lain bahwa Pengelolaan air bersih yang dikelola oleh BUMDES Kertajaya sudah dapat memberikan air untuk sebagian warga desa.

Penelitian keempat agus salihin yang berjudul peran badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Pejanggik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dari hasil penelitian tersebut bahwa BUMDES yang berada di Desa Pejanggik mempunyai 3 unit usaha yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, Pengelolaan Air dan Budidaya Ternak Kambing. Pada Unit pengelolaan Air Bersih berdiri sejak Tahun 2016, yang sekarang sudah mendapatkan 160 KK dengan pembayaran awal Rp400.000 per anggota/ pelanggan untuk pemasangan pipa dan pembayaran Rp.40.000 untuk per anggota/pelanggan untuk oprasional. Dari penelitian tersebut menilai bahwa Unit Pengelolaan Air Bersih masih tidak dapat berjalan secara Efektif, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran iuran.

Penelitian kelima gede fanny W A, Nyman putra Y, edy sujana dengan judul analisis perbedaaan dasar perhitungan tariff harga air bersih dan pengelolaan dana pemdes di BUMDES bhauna (studi pada BUDES bhuana utama Desa Panji Kec. Sukasada Kab. Bulelelng Prv Bali. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitaian ini mengamati serta mengobserfasi data yang telah ada. Hasil dari penelitian tersebut bahwa BUMDES Bhuana Utama telaha dapat mendistribusikan air ke masyarakat dengan cara menjual sapi milik desa, supaya dapat mendapatkan dana untuk pembangunan pipa air yang digunakan untuk mendistribusikan air keada masyarakat. Serta BUMDES Bhuana Utama juga memberikan tarif yang berbeda terhadap penduduk lokal Desa panji dengan penduduk pendatang. Tarif untuk penduduk lokal dikenakan biaya Rp. 150 sampai Rp. 1.000 per meter kubik sedangkan untuk penduduk pendatang dikenakan tarif Rp. 500 sampai Rp. 2.500 per meter kubik. Hal ini menunjukan Desa Panji telah mengalami kemajuan, yang menjadi banyak penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1 Peran

Peran merupakan pembagian orientasi yang dimainkan oleh pihak yang menjalankan posisi sosialnya. Peran perilaku dalam bentuk individu maupun kelompok baik secara individual maupun jamak yang dapat dikatakan sebagai struktur. (Rivai,2003). Peran pemerintah yang dimaksud mencakup terkait peran sebagai wirausahawan, koordinatoring, fasilatoring dan stimulatoring (Kuncoro, 2004).

Peran ialah penggambaran terkait sesuatu hal yang dimainkan oleh seseorang pada suatu posisi di lingkungan sosialnya. Hal tersebut dapat berupa gerakan perseorangan ataupun hingga kelompok, baik kecil maupun besar. Dari setiap gerakan tersebut, semuanya berjalan berdasarkan peran, yang baik itu bersifat perilaku individu maupun kelompok dan hal tersebut dinyatakan sebagai struktur (Rivai 2003).

Peran merupakan suatu proses dinamis dari kedudukan seseorang, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Dalam melaksanakan peran, antara peran dan kedudukan tidak boleh dipisahkan, karena keduanya memiliki keterkaitan masing-masing (Soekamto 2002). Menyebutkan juga terkait unsur-unsur dari peran :

- a. Aspek dinamis dalam suatu kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Aktivitas yang dijalankan oleh seseorang.

Lembaga juga memiliki peran yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya masing masing, kedua hal itu tidak dapat dipisahkan oleh orang yang berada dalam suatu lembaga tersebut. Tugas tersebut diartikan sebagai seperangkat pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh seseorang maupun lembaga. Sementara fungsi diartikan sebagai adanya suatu kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam suatu organisasi,

sesuai dengan bidang dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya (Himawan 2004).

Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bila kita kaitkan dengan peran pemerintah, ialah suatu tugas dan fungsi yang dijalankan untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Peran pemerintah juga berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu peran wirusahawan, koordinatoring, fasilatoring dan stimulatoring. (Kuncoro 2004). Peran yang di sebutkan didalam Ensiklopedia yang di kemukaan oleh komarudin(1974:768) bahwa:

1. pembagian tugas yang harus dilaksanakan oleh manajemen.
2. pola perilaku yang dijalankan dalam status tertentu.
3. pembagian kegiatan yang memiliki fungsi tertentu.
4. Harapan seseorang dalam sebuah tatanan yang memiliki fungsi yang di harapkan.
5. hubungan setiap variabel yang memiliki fungsi tertentu.

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang seringkali di sebut BUMDES, dalam UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang bermodalkan dari desa itu sendidiri secara langsung untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa memiliki prinsip harus mendapatkan kesepakatan dari Pemerintah Desa, setruktural BUMDES, BPD (Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa dan Pemerintah Kabupaten. Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDES :

1. Koperatif, dalam keberlangsungan hidup usaha diharuskan mampu melukan kerjasama dengan baik demi dapat mengembangkan usaha dengan baik.

2. Partisipatif, segala unsur maupun komponen yang memiliki hubungan dengan BUMDES harus dapat menjadi sukarelawan memberikan kontribusi maupun dukungan dalam kemajuan BUMDES.
 3. Emansipatif, harus berperilaku adil terhadap semua komponen di dalam BUMDES
 4. Transparan, segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat, harus dapat di publikasikan terhadap masyarakat secara terbuka dan jelas untuk segala informasi tentang bumdes dapat diketahui oleh keseluruhan masyarakat.
 5. Akuntabel, segala urusan didalam BUMDES harus ada pencatatan untuk dapat bertanggung jawab secara administratif ataupun teknis.
 6. Sustainable, BUMDES merupakan bentuk usaha yang dilestarikan oleh masyarakat, dengan kata lain untuk kemajuan BUMDES diperlukan adanya dukungan dan dukungan masyarakat untuk menjadikan BUMDES lebih berkembang
1. masyarakat.

Dalam implementasi ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan proses penguatan ekonomi lokal, dalam proses pemberdayaan BUMDES. Anggaran desa yang semakin besar yang menjadi kemungkinan pendirian. Hal yang utama dalam penguatan perekonomian desa ialah menjalin hubungan yang erat di setiap lapisan masyarakat desa serta dapat membangun kerjasama sehingga BUMDES dapat menjadi daya dorong (stream Engine) dalam membangun lapangan pekerjaan baru yang dapat mengentaskan pengangguran dan kemiskinan (Bagus Setiawan, 2007:1-14)

2.2.3 Desa

Desa yang dituangkan dalam Undang Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa, menerangkan bahwa desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki wewenang dalam menjalankan mengatur maupun mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal usul desa yang di sepakati oleh

masyarakat. Dalam penjelasan yang dituang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa maka desa merupakan Self Community yang berarti dapat mengatur daerahnya sendiri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan Pemerintahan Desa berdasarkan kepentingan masyarakat dan kondisi sosial budaya yang sesuai dengan kondisi desa.

Desa didefinisikan sebagai tatanan masyarakat hukum yang memiliki tatanan berdasarkan hak asal usul daerah tersebut (Widjaja, 2003:3). Dengan kata lain desa merupakan sebagai lembaga yang memiliki hukum adat yang telah disepakati dalam mengurus ataupun mengatur rumah tangganya (Soetardjo dan Nurcholis, 2011:20). Desa merupakan perwujudan dari geografis, politik, sosial, kultural pada suatu daerah yang memiliki hubungan timbal balik dengan daerah yang berada. (R. Bintarto 1989).

Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki wilayah pada suatu daerah memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa dan kepentingan masyarakat, dalam mengatur pemerintahan desa harus diakui dalam Undang Undang. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa desa memiliki hak otonomi asli yang strategis untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, akan tetapi hal ini juga dapat ditunjang dengan otonomi daerah karena otonomi desa juga akan berpengaruh terhadap otonomi daerah.

Berdasarkan PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang indeks Desa membangun memiliki tipologi yang dijadikan pertimbangan dalam menrencanakan program maupun kegiatan pembangunan didesa, berikut tipologi/ klasifikasi status desa :

1. Desa pratama atau desa tertinggal merupakan desa yang rentan dalam masalah bencana alam, perekonomian dan konflik sosial yang menjadikan memiliki kemampuan dalam mengelola potensi yang ada.

2. Desa pramadya atau desa tertinggal desa yang mampu meningkatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, akan tetapi belum atau kurang dalam pengelolaannya
3. Desa madya dengan kata lain desa berkembang, merupakan desa yang memiliki potensi dalam sumber daya alam dan memiliki sumber daya manusia dengan baik, akan tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
4. Desa Pra Sembada atau dalam kategori desa maju merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.
5. Desa Sembada atau disebut desa mandiri merupakan desa yang sudah mampu melaksanakan pembangunan desa dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta sudah memiliki ketahanan dalam aspek kesejahteraan, perekonomian dan ekologi masyarakat.

2.2.4 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah proses pengaturan dan pengawasan dalam sebuah tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan merupakan tindakan untuk dapat mempermudah kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan dengan pembagian tugas dan fungsi setiap kegiatan untuk dapat meningkatkan nilai yang lebih tinggi. Menurut Nugroho (2003:119) pengelolaan merupakan ilmu yang dikaji dalam ilmu manajemen yang secara etimologi berasal dari kata (to manage) merupakan tindakan mengurus atau mengatur suatu tindakan untuk dapat mencapai tujuan bersama.

Pengelolaan merupakan kegiatan yang dinilai dapat membantu dalam melilik arah kebijakan dalam organisasi tertentu, dengan melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan (Poerwadarminta, 2006). Dengan kata lain pengelolaan ini merupakan sebuah tindakan untuk mengetahui arah yang tepat dalam memilih sebuah kebijakan

untuk dapat mempermudah dalam setiap mekanismenya dan merupakan proses pengamatan untuk dapat meningkatkan nilai dari suatu organisasi. Menurut (Dewi, 2011) memiliki terdapat 8 unsur dalam kegiatan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir kelompok dan penyusunan kerangka kerja untuk dapat menjalin hubungan kerjasama antar tim pekerja dalam mencapai tujuan, organisasi ini sendiri juga memiliki 2 sifat yang penting yaitu bersifat statis dan bersifat dinamis, sifat-sifat tersebut sebagai berikut:
 1. Organisasi bersifat statis merupakan kelompok kerja yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing secara setruktural dan fungsional secara individual berdasarkan keahliannya masing-masing.
 2. Organisasi bersifat dinamis merupakan jalur komunikasi dalam pembagian tugas dalam wewenang untuk dapat menjalin kerjasama.
- b. Manajemen merupakan bentuk kerjasama antara individu maupun kelompok dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan menggerakkan untuk mencapai arah tujuan yang baik. Menurut Henry Fayol ada beberapa hal yang harus ada dalam menunjang sarana dalam melakukan manajemen berupa manusia, anggaran, sistem kerja, peralatan yang mendukung, peralatan teknologi dan pemasaran.
- c. Komunikasi kegiatan antara perorangan maupun kelompok dalam menyampaikan gagasan ataupun ide-ide sebagai hubungan timbal balik disetiap sektornya.
- d. Penyampaian informasi kegiatan kepada sektor yang berkaitan untuk dapat dipergunakan sebagai informasi dalam bekerjasama anatara tim
- e. Pengaturan sumber daya manusia yang di perlukan
- f. Pembekalan dalam perencanaan, pengaturan dan pengadaan barang maupun jasa untuk dapat menjadi lebih efisien dan efektif.

- g. Menciptakan hubungan masyarakat yang baik dari lingkungan yang didalam maupun lingkungan yang diluar

2.2.5 Fasilitas Air Bersih

Fasilitas merupakan sarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Menurut (kotler P. 2016) fasilitas merupakan penunjang dalam penyediaan jasa untuk dapat meningkatkan kenyamanan konsumen. Sedangkan menurut drajad, 12014 fasilitas merupakan segala sesuatu hal yang dapat menunjang serta dapat mempermudah upaya dalam mencapai tujuan. Air bersih merupakan air yang dapat di minum dengan standart baku mutu tertentu. menurut kodatie air bersih adalah air dapat diminum setelah dimasak, mandi, mencuci, memasak dalam keseharian masyarakat.

Fasilitas air bersih merupakan sarana air yang memiliki baku mutu tertentu yang dapat menunjang kegiatan manusia dalam kegiatan kesehariannya sebagai penunjang kegiatan sehari-hari masyarakat dalam melakukan setiap aktifitasnya. Dengan kata lain fasilitas air bersih ini merupakan pengadaan jasa sumber daya alam yang harus ada terlebih dahulu sebelum adanya penawaran terhadap konsumen.

2.2.6 Air Bersih

Air bersih merupakan air yang layak dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari dalam standart baku mutu tertentu, berdasarkan Peranturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.416. IX/1990 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air memiliki 3 syarat yaitu sebagai berikut

1. Kualitas air berdasar fisiknya :
 - a. Tidak memiliki warna
 - b. Tidak memiliki bau
 - c. Tidak memiliki rasa
 - d. Memiliki suhu diantara 10°C-25°C)

2. Kualitas air berdasarkan Kimiawinya:

Secara kimiawi air tersebut tidak terkandung bahan racun serta tidak terkandung zat yodium yang berlebihan dan memiliki Ph air 6,5 sampai

9,2. Kualitas air berdasarkan bakteriologinya:

Kualitas air yang memiliki kandungan kuman penyakit kolera, disentri dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit yang lainnya.

Air bersih menurut Kodatie (2003) menerangkan bahwa air bersih merupakan air yang layak digunakan manusia dalam kegiatan disetiap harinya i seperti dapat diminum setelah dimasak, dapat dipergunakan untuk kegiatan memasak, kegiatan mandi dan kegiatan mencuci. Sedangkan menurut Suripin (2002) bahwa air bersih merupakan air yang layak diminum bila setelah dimasak, air yang tidak memiliki bau, air yang tidak memiliki warna dan segar bila diminum.

Penyediaan air bersih di Indonesia bisa di dapatkan dari masyarakat itu sendiri secara individu atau bisa didapatkan secara kelompok dan yang disajikan pemerintah. Kualitas air bersih yang digunakan masyarakat masih belum memenuhi standar dari Peranturan Menti Kesehatan Republik Indonesia No.416. IX/1990, hal ini perlunya dilakukanya pengontrolan untuk dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dalam pengkonsusian air yang layak.

2.2.7 Kebutuhan air bersih

Kebutuhan air bersih merupakan air yang layak digunakan berdasarkan baku mutu kesehatan yang di harapkan dapat memenuhi dalam kegiatan masyarakat. Kebutuhan air meliputi 2 kategori menurut (Kodatie, 2003) yaitu kebutuhan domestik dan non domestik, air pada kebutuhan domestic merupakan air yang digunakan dalam kegiatan rumahan, sedangkan non domestik merupakan air yang digunakan dalam sarana umum seperti mushola, masjid, sekolahan dan sarana umum lainnya.

Kebutuhan air bersih ini akan selalu ada peningkatan karena semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan industri serta meningkatnya kebutuhan air yang layak berdasarkan syarat kesehatan. Hal ini bisa ditinjau dari banyaknya penduduk serta lebih banyaknya industrial yang dibangun dapat menyebabkan kualitas air yang menurun. Kebutuhan air pada daerah pemukiman perdesaan dan pemukiman perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan air merupakan air yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan air pemukiman penduduk untuk kehidupan setiap harinya. Dalam pemenuhan kebutuhan air maka diperluknya perhitungan pippansi untuk dapat mendistribusikan air dengan baik. Pertimbangan kehilangan air dalam (Jendral Cipta Karya Direktorat Air Bersih, 1987) menyebutkan ada 2 faktor yaitu:

1. Faktor teknis adanya rembesan air dalam bentuk lubang pada jaringan pipa dikarenakan faktor kesalahan pemasangan pipa ataupun karena perhitungan kekuatan atau ketahanan yang kurang baik.
2. Faktor non teknis adanya kesalahan dalam pembacaan, penulisan meteran air yang mengakibatkan kesalahan dalam penulisan buku rekening pelanggan